

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zainal Arifin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Cet. 11. Rajawali Pers, 2019)
- Blumut, Yami, Sejarah Pemilu Di Indonesia, (Jakarta: Gema Bhumi Phala, 2009)
- Fritz Edward Siregar. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. 2020. Konstitusi Press. Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Kencana)
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018)
- M, Djanedjri, Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, (Jakarta: Harian Seputra Indonesia)
- Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud dalam Dwi Putra Nugraha, et al. Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia, (Yogyakarta: Cet 1. Thafa Media, 2017)
- Santoso, Topo Dan Didik Suprianto, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji dalam Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Cet 2. Rajawali Pers, 2018)
- Supriyanto, Didik dkk, Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014, (Jakarta: Perludem, 2012)
- Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Thalib, Dahlan dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2008)

Tim Peneliti Perludem, Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004, (Jakarta:Perludem, 2006)

Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945, (Jakarta: Kencana, 2010)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII-2019.

JURNAL

Adam Sani, Ilka Sandela, Nila Trisna. *Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7*

*Tahun 2017 tentang Pemilu.*Jurnal Ius Civile, Vol 5, No. 2, Oktober 2021

Andi Setiawan dan Hilmi Mandala.*Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak.*Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2-Agustus 2020

Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin. *Penguatan Kewenangan Lembaga Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu.*Jurnal Legal Spirit, Vol 1, No 2 (2017).

Darmadi, Nanang Sri, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*,Jurnal Hukum, (Semarang: Vol XXVI, No. 2, 2011).

Harahap, Dessy Agustina. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah.*Jurnal Mercatoria Vol. 10 No. 1, Juni 2017

M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah. *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.*Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020

- Maulidi, Mohammad Agus, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, (No. 4 Vol. 24 Oktober 2017).
- Mauludi, Muhammad Bastari, *Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*. Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2 Oktober 2021
- Rajab, Achmadudin, *Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terkait Pelibatan Bawaslu Kabupaten/Kotadalam Hal Pengawasan Pilkada 2020*, Jurnal Rechtstvinding, (Februari 2020).
- Respationo, Soerya, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Elektoral*, Jurnal Masalah- Masalah Hukum, (Jilid 42 No. 3, Juli 2013).
- Ristyawati, Aprista. *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020
- Sonata, Depri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, (Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014).
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi, (Vol II nomor 2, November 2010).
- Zul Hendri Nov. *Politik Hukum Perubahan Sifat Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi: Perubahan Sifat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Menjadi Definitif dan Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2019)*. Jurnal Selat, Volume. 7 Nomor. 2, Mei 2020